



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KITA
INDONESIA**



**KITA
PANCASILA**

#BULANPANCASILA2019



KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL (KEM PPKF) TAHUN 2020

Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI
Jakarta, 11 Juni 2019





VISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN



INDONESIA 2045: MENJADI NEGARA MAJU

Tema Kebijakan Fiskal 2020:

“APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”

PENDUDUK

319 Juta Jiwa

EKONOMI

ke **5** Terbesar di Dunia

STRUKTUR

bergeser pada **Sektor Bernilai Tambah Tinggi**

PRODUKTIVITAS

Usia Produktif **47%**

MIDDLE INCOME

70% Kelas Menengah

BISNIS

73% Kue Ekonomi Berasal dari Sektor Jasa

URBAN

73% Tinggal di Kota

PERKAPITA

Pendapatan per Kapita **US\$23.199**

Sumber: Bappenas, Kemenkeu

Infrastruktur

Infrastruktur yang layak menjadi penyokong mobilitas dan mendorong pembangunan



Kualitas SDM

Penguatan SDM melalui pendidikan dan riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial

Teknologi

Pengayaan inovasi dan teknologi berperan dalam menjawab tantangan industri kedepan



Birokrasi Pemerintah

Perbaikan kualitas pelayanan dan efisiensi proses bisnis diperlukan

Tata Ruang Wilayah

Pengelolaan tata ruang yang baik dan didukung oleh sistem yang integratif



Sumber Daya Ekonomi dan Keuangan

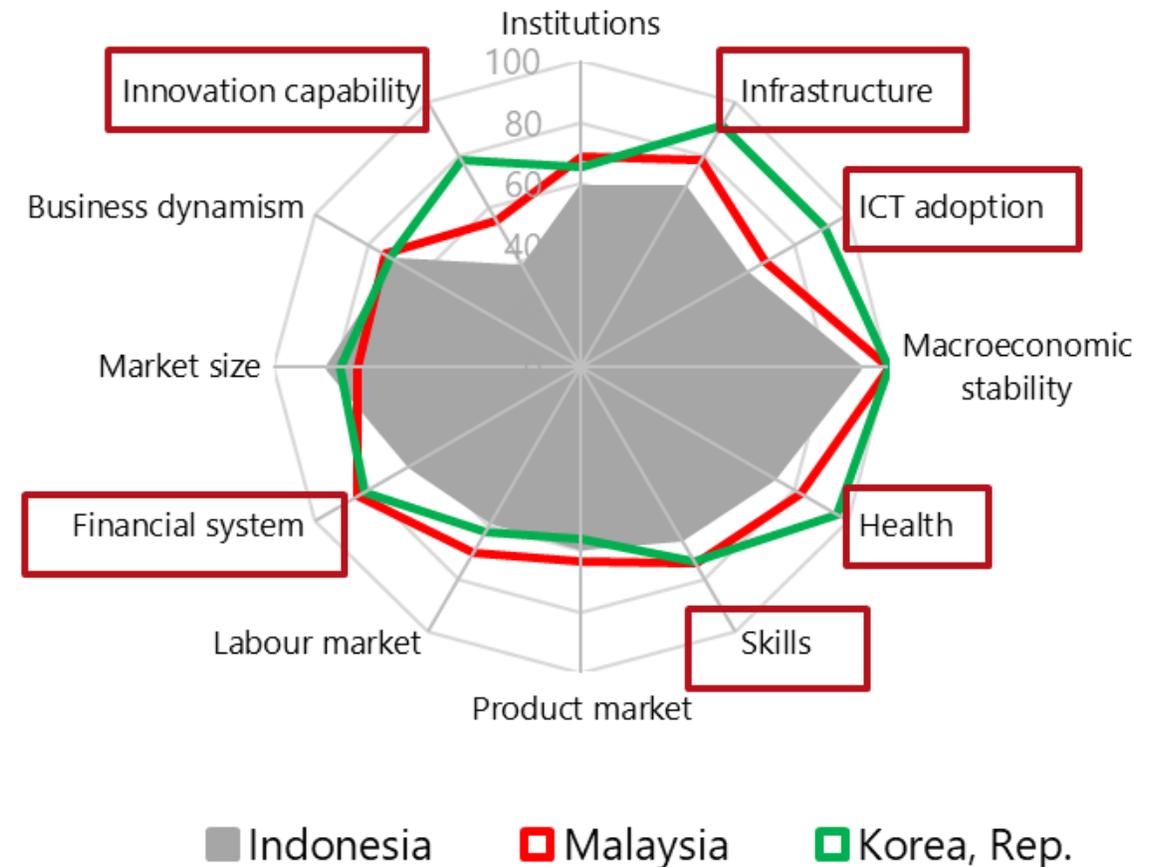
APBN sehat menjadi kunci kesuksesan target 2045



DAYA SAING NASIONAL HARUS DITINGKATKAN

- **Produktivitas dan daya saing harus ditingkatkan untuk mampu mengejar level index GCI Malaysia (*upper middle income*) dan Korea Selatan (*high income*).**
- Fokus pada aspek: **infrastruktur, kualitas SDM** (kesehatan, skills, dan pasar tenaga kerja), **kemampuan berinovasi dan adaptasi teknologi, serta sistem keuangan.**
- **Perbaikan infrastruktur** menjadi kunci penting dalam peningkatan daya saing dan produktivitas, Sebagaimana rilis *IMD World Competitiveness Yearbook*, peringkat Indonesia meningkat signifikan dari 43 di tahun 2018 menjadi peringkat 32 pada tahun 2019.

PRODUKTIVITAS & DAYA SAING



Sumber: GCI (World Economic Forum), GDP per Capita (harga berlaku) Indonesia (BPS), Malaysia & Korea (World Bank)



4 TANTANGAN PEMBANGUNAN:

Perlu langkah antisipatif dan responsif untuk akselerasi daya saing, melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM

1. *Output Gap*
2. Perubahan Demografi
3. *Middle Income Trap*
4. Perubahan Struktural

(1) OUTPUT GAP



Sumber: Kemenkeu, diolah dari data BPS

(2) PERUBAHAN DEMOGRAFI DAN DISTRIBUSI



AGING POPULATION

Tren meningkatnya Lansia (umur 60+): dari 7% (2010) → 13% (2030), sehingga ada risiko "tua sebelum kaya"



URBANIZING

Tren meningkatnya urbanisasi 48,8% (2010) → 63,4% (2030), ada isu ketahanan pangan dan ketimpangan



GROWING MIDDLE INCOME CLASS

Tren meningkatnya kelas menengah 19% (2010) → 49% (2030), aspirasi terhadap kualitas pelayanan publik → peningkatan belanja publik vs kecukupan penerimaan



SKILL ADEQUACY

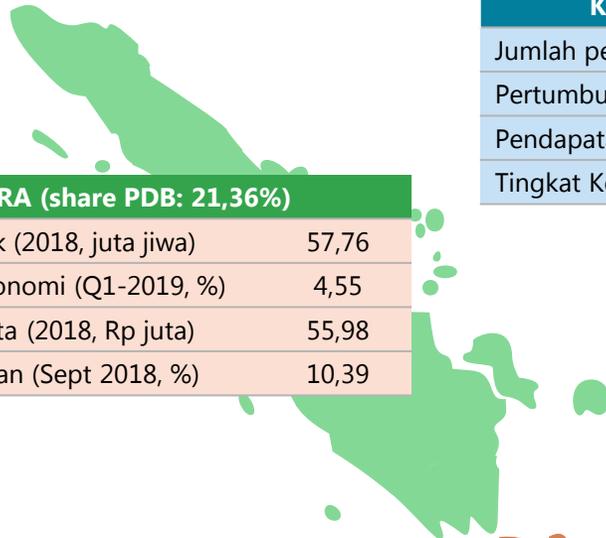
59% tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah, terdapat risiko *skill mismatch*, *skill gap*, dan rendahnya produktivitas

Upaya reformasi struktural harus didorong untuk peningkatan level output potensial

- **Akselerasi daya saing dilakukan melalui kebijakan reformasi struktural:** peningkatan sisi penawaran (*supply side economy*) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
- **Upaya reformasi struktural** diarahkan melalui:
 - ✓ **Penguatan investasi:** mendorong kemudahan investasi dan penyediaan infrastruktur
 - ✓ **Peningkatan produktivitas (TFP):** peningkatan penguasaan teknologi, efisiensi produksi, dan *skill* tenaga kerja.



PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDUDUK INDONESIA MASIH TERPUSAT DI PULAU JAWA



SUMATRA (share PDB: 21,36%)

Jumlah penduduk (2018, juta jiwa)	57,76
Pertumbuhan ekonomi (Q1-2019, %)	4,55
Pendapatan/kapita (2018, Rp juta)	55,98
Tingkat Kemiskinan (Sept 2018, %)	10,39

KALIMANTAN (share PDB: 8,26%)

Jumlah penduduk (2018, juta jiwa)	16,9
Pertumbuhan ekonomi (Q1-2019, %)	5,33
Pendapatan/kapita (2018, Rp juta)	72,71
Tingkat Kemiskinan (Sept 2018, %)	6,09

SULAWESI (share PDB: 6,14%)

Jumlah penduduk (2018, juta jiwa)	19,46
Pertumbuhan ekonomi (Q1-2019, %)	6,51
Pendapatan/kapita (2018, Rp juta)	47,88
Tingkat Kemiskinan (Sept 2018, %)	10,64

JAWA (share PDB: 59,03%)

Jumlah penduduk (2018, juta jiwa)	149,64
Pertumbuhan ekonomi (Q1-2019, %)	5,66
Pendapatan/kapita (2018, Rp juta)	58,57
Tingkat Kemiskinan (Sept 2018, %)	8,94

BALI & NUSRA (share PDB: 3,02%)

Jumlah penduduk (2018, juta jiwa)	14,68
Pertumbuhan ekonomi (Q1-2019, %)	4,64
Pendapatan/kapita (2018, Rp juta)	31,16
Tingkat Kemiskinan (Sept 2018, %)	14,02

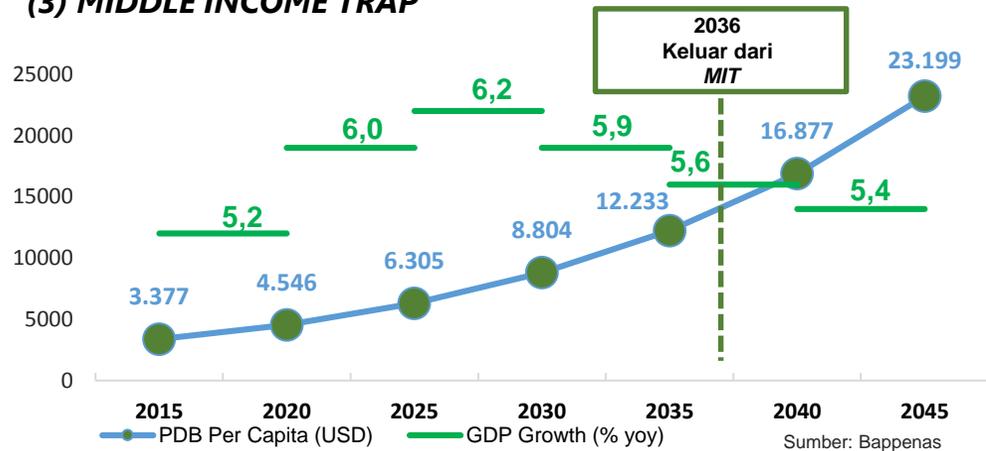
PAPUA & MALUKU (share PDB: 2,19%)

Jumlah penduduk (2018, juta jiwa)	7,27
Pertumbuhan ekonomi (Q1-2019, %)	-10,44
Pendapatan/kapita (2018, Rp juta)	50,90
Tingkat Kemiskinan (Sept 2018, %)	21,20



4 TANTANGAN PEMBANGUNAN...(2)

(3) MIDDLE INCOME TRAP

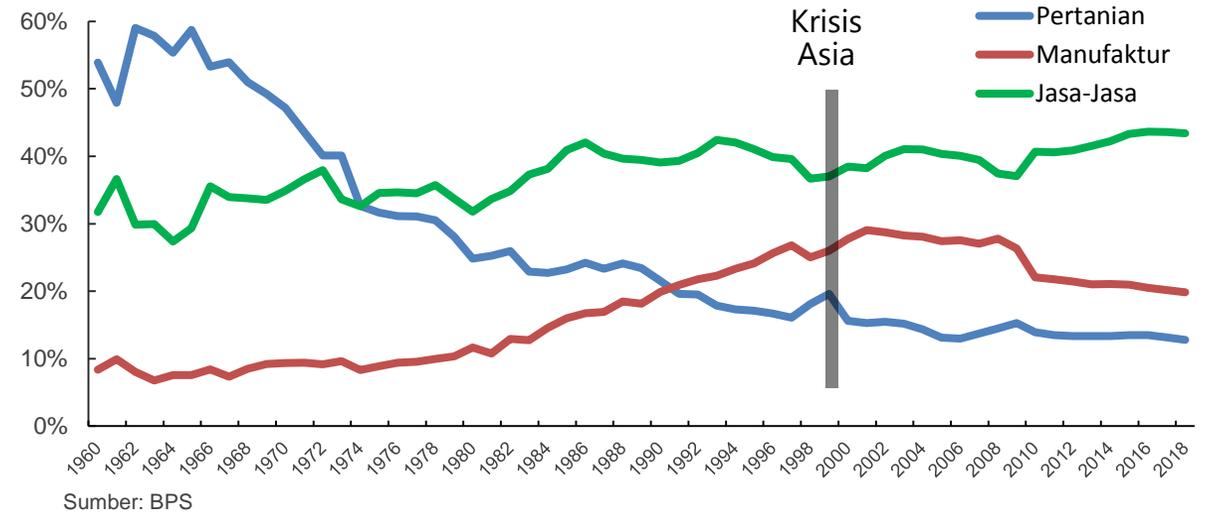


- MIT adalah kondisi dimana suatu negara tidak dapat meningkat menjadi *high income countries*
- Daya saing perekonomian lemah:
 - ✓ dengan *low income countries* → upah tenaga kerja lebih murah
 - ✓ dengan *high income countries* → kalah bersaing dalam teknologi
- Dibutuhkan kemampuan diversifikasi industri, industri dengan teknologi yang lebih maju, kondisi pasar tenaga kerja yang kondusif, dan tingkat investasi yang cukup tinggi
- **Pertumbuhan rata-rata di atas 6% dalam periode 2020-2030** menjadi prasyarat untuk dapat keluar dari *Middle Income Trap*.



(4) PERUBAHAN STRUKTURAL & INDUSTRI 4.0

Untuk mampu keluar dari MIT, struktur ekonomi harus bertransformasi ke aktivitas bernilai tambah tinggi & mampu beradaptasi dengan Industri 4.0



TANTANGAN UTAMA: MENCEGAH DEINDUSTRIALISASI PREMATUR

Sejak krisis Asia 1998, proses transformasi struktural mengalami perlambatan. Indonesia harus melanjutkan akselerasi transformasi struktural

Arah Kebijakan:

- **INDUSTRIALISASI** untuk membangun *export-based industry and natural resource processing* di seluruh wilayah RI **dan REINDUSTRIALISASI** dengan revitalisasi manufaktur berteknologi tinggi khususnya di wilayah Jawa
- **OPTIMASI SEKTOR JASA:** Mempersiapkan industri di masa depan yang mampu adaptasi dengan perkembangan Digitalisasi, *e-Commerce*, dan Industri 4.0 (*internet of things*)



KEBIJAKAN MAKRO FISKAL JANGKA MENENGAH-PANJANG YANG BERKESINAMBUNGAN

“Menuju Long Term Fiscal Sustainability - LTFS”



MENUJU INDONESIA BERDAULAT, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR

Reformasi fiskal pada saat terjadinya bonus demografi (2020-2030) untukantisipasi *aging population* dan keluar dari *middle income trap*



2020-2030

Penguatan Daya Saing

PENGUATAN FONDASI

- Reformasi **perpajakan dan Reformasi PNBPNBP** serta **pendalaman sektor keuangan (a.l pengelolaan aset negara)**;
- **Penguatan kualitas SDM** (produktif, inovasi, karakter, *skill*, *entrepreneurship*, kompatibel dengan ICT);
- **Perlindungan sosial** (penguatan bansos dan pemberdayaan) menjawab tantangan demografi;
- **Infrastruktur mendukung transformasi industri**; (energi EBT, pangan, konektivitas)
- **Reformasi birokrasi** selaras dengan kemajuan ICT.

2031-2035

Memperkokoh Daya Saing

TRANSISI

- **Memantapkan kualitas SDM** yang *compatible* ICT dan *economic knowledge*;
- Memantapkan **social protection** yang handal (jaminan sosial, bansos, pemberdayaan sosial dan jaring pengaman);
- Infrastruktur pendukung industrialisasi telah **memadai dan berfungsi optimal**;
- **Birokrasi yang efisien**;
- **APBN dan insentif fiskal yang solid**.

2036-2045

Negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur

TINGGAL LANDAS

- **Fondasi ekonomi kuat**
 - ✓ Industrialisasi berbasis *local content* dan *value added*;
 - ✓ Kedaulatan pangan dan energi;
 - ✓ Kelas menengahnya dominan;
- **Kesejahteraan mapan** (*income* perkapita tinggi);
- **Keadilan sosial**;
- **Stabilitas keamanan, politik, ekonomi**;
- **Kemandirian ekonomi** (investasi, konsumsi kelas menengah tinggi, ekspor tinggi, APBN sehat).



KEBIJAKAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI JANGKA MENENGAH

Pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen untuk mendukung stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi

1 Peningkatan Produktivitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur

- Produktivitas SDM akan dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM, baik kualitas kesehatan maupun pendidikan
- Pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada infratsruktur energi dan ketenagalistrikan serta infrastruktur ekonomi untuk mendukung sektor manufaktur dan sektor unggulan.

2 Reformasi Institusi Guna Mendukung Akselerasi Pembangunan

- Reformasi institusional akan dilakukan pada berbagai aspek kenegaraan, termasuk reformasi institusi ekonomi, hukum, maupun politik

3 Transformasi Ekonomi Untuk Neraca Perdagangan

- Mendorong pertumbuhan sektor bernilai tambah tinggi, khususnya sektor manufaktur dan jasa yang dapat menyerap tenaga kerja dengan produktivitas tinggi
- Pendampingan kepada pelaku ekspor, baik untuk mengatasi kendala ekspor maupun untuk kegiatan promosi produk dan negosiasi

4 Pendalaman Sektor Keuangan Sebagai Sumber Pembiayaan Investasi

- Peningkatan keuangan inklusif, pembangunan infrastruktur digital mengikuti panduan *Bali Fintech*, diversifikasi produk termasuk produk ekonomi syariah, serta meningkatkan peran pasar modal sebagai alternatif perbankan



PROYEKSI INDIKATOR MAKRO

Dipengaruhi Perkembangan Ekonomi Global

KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Perang Dagang & Proteksionisme

- Memberikan risiko kepada **tingkat permintaan dunia**
- Memberikan risiko terhadap **perekonomian AS dan Tiongkok**, yang merupakan negara-negara mitra dagang utama Indonesia

Brexit

- Mempengaruhi prospek **perdagangan Eropa dan Inggris**
- Memberikan sentimen negatif di **pasar keuangan global**

Fluktuasi Harga Komoditas

Memberikan risiko pada **Neraca Perdagangan, penerimaan negara, dan subsidi**

Moderasi Pertumbuhan Tiongkok

Berpotensi memberikan tekanan pada **Neraca Perdagangan Indonesia**, mengingat Tiongkok merupakan mitra dagang utama

Keamanan dan Geopolitik

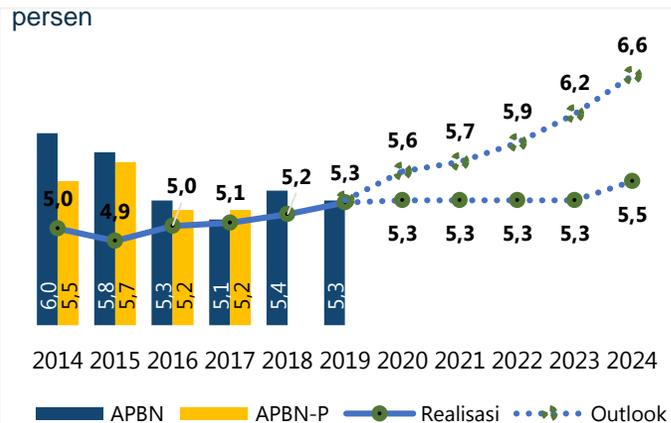
Berpotensi mempengaruhi **sentimen di pasar keuangan dan komoditas**

Perubahan Iklim

Menciptakan ketidakpastian pada **produktivitas global** antara lain sektor pertanian, kesehatan, dan bencana alam

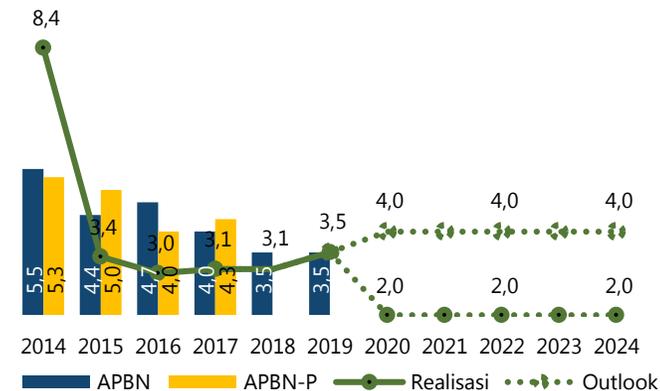
PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi meningkat hingga kisaran 5,3-6,6 persen



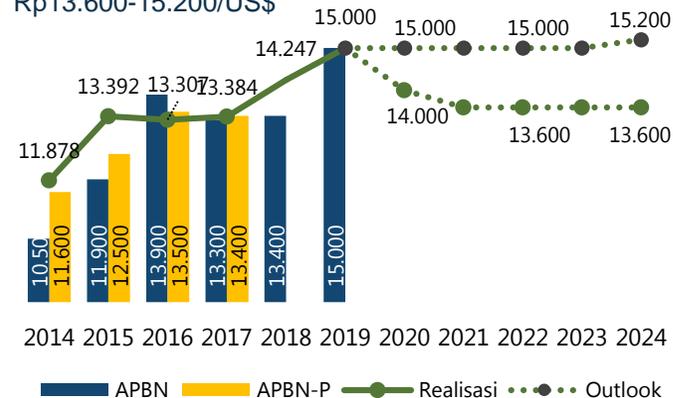
PERKIRAAN LAJU INFLASI

Laju Inflasi dapat dijaga pada kisaran 3,0 ± 1,0 persen



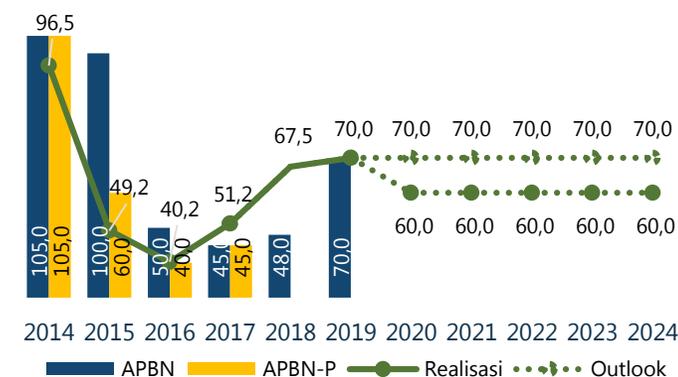
PERKIRAAN NILAI TUKAR RUPIAH

Pergerakan nilai tukar rupiah dijaga pada rentang Rp13.600-15.200/US\$



PERKIRAAN HARGA ICP

Harga minyak mentah Indonesia berada pada kisaran US\$60-70 per barel





KEBIJAKAN FISKAL



EKONOMI MAKRO

- Meningkatkan pertumbuhan;
- Mendorong daya saing;
- Meningkatkan investasi.

PENYEHATAN FISKAL

- Mobilisasi pendapatan;
- *Spending Better*;
- Pembiayaan kreatif dan Pengendalian Risiko

PERBAIKAN NERACA PEMERINTAH PUSAT

- Peningkatan aset;
- Pengendalian Liabilitas
- Peningkatan Ekuitas

Kerangka Kebijakan Fiskal:

- Mencapai Sasaran Makro
- Penyehatan Fiskal
- Perbaikan Neraca Pemerintah Pusat

STRATEGI MAKRO FISKAL

1

Mobilisasi Pendapatan yang inovatif untuk pelebaran *fiscal space* dalam rangka **memperkuat belanja pembentuk aset:**

- Reformasi perpajakan
- Reformasi PNBPN
- Insentif fiskal

2

Spending Better untuk efisiensi belanja dan **meningkatkan belanja modal pembentuk aset;**

- Penajaman belanja barang
- Penguatan belanja modal
- Reformasi belanja pegawai
- Efektifitas Bansos dan Subsidi
- Penguatan kualitas desentralisasi fiskal

3

Pembiayaan yang Kreatif dan mitigasi risiko untuk **mengendalikan liabilitas:**

- Pengendalian defisit dan utang
- Pembiayaan yang efisien dan kreatif

PERBAIKAN NERACA PEMERINTAH PUSAT

1

ASET



- Mobilisasi pendapatan akan berdampak pada pelebaran *fiscal space*.
- *Pelebaran fiscal space* dan *spending better* diharapkan dapat meningkatkan aset produktif

2

LIABILITAS



Pelebaran fiscal space, dan *spending better juga* dapat memitigasi risiko dimasa depan sehingga dapat mengendalikan Liabilitas

3

EKUITAS



Dengan spending better dan pengendalian risiko yang solid akan dapat meningkatkan Ekuitas



MENJAGA KEBERLANJUTAN FISKAL

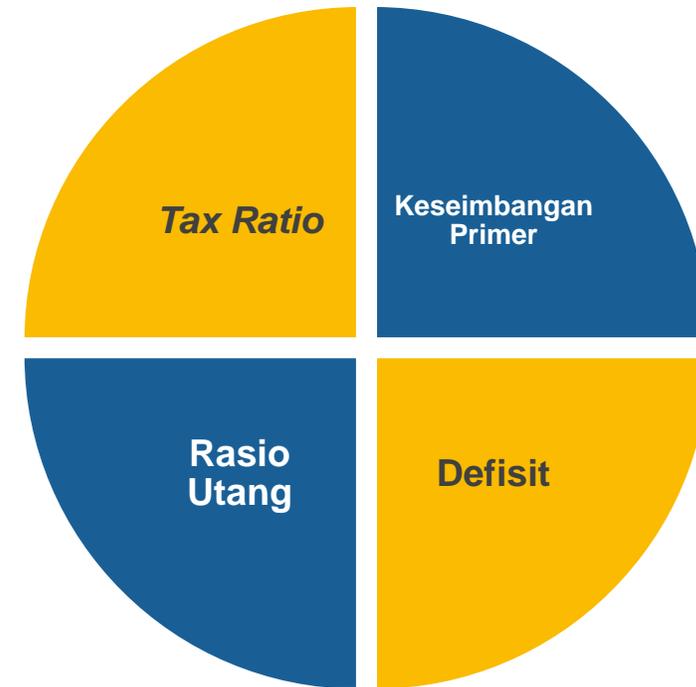
Karena kebijakan fiskal adalah instrumen bagi kesejahteraan, maka kesehatan kondisi fiskal perlu terus dijaga melalui optimalisasi penerimaan negara dan pengelolaan risiko (defisit, keseimbangan primer, dan rasio utang)

- **Meningkatnya penerimaan perpajakan akan memperlebar ruang fiskal** untuk memperkuat kualitas belanja negara;
- Pelebaran ruang fiskal juga ditempuh dengan **reformasi PNB, efisiensi belanja (*value for money*) dan skema pembiayaan kreatif dengan KPBU**;
- Seiring melebarnya ruang fiskal, maka keseimbangan **primer dapat diarahkan menuju positif dan defisit dijaga pada level aman dan lebih rendah**;
- Hal tersebut dapat **mengurangi pembiayaan utang**, sehingga **rasio utang dikelola secara prudent dan semakin menurun**



ARAH MAKRO FISKAL

1. **Optimalisasi pendapatan negara dengan:**
 - **Penerimaan perpajakan didorong meningkat**
 - **Reformasi PNB: Penguatan pengelolaan SDA, pelayanan K/L, aset**
2. **Defisit dikendalikan pada batas aman**
 - **Efisiensi belanja Negara dan efektivitas desentralisasi fiskal**
 - **Mendorong K/L menerapkan pembiayaan kreatif**
3. **Keseimbangan primer didorong positif**
4. **Utang dikelola secara prudent dengan menjaga rasio utang pada batas aman**





VISI : MENUJU INDONESIA YANG BERDAULAT, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

ARAH “MENDORONG PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING BANGSA”



Penguatan Belanja yang Berkualitas

1. Penguatan kualitas SDM **(produktivitas dan inovasi agar kompatibel dengan ICT)**
2. Percepatan pembangunan infrastruktur **mendukung transformasi ekonomi dan merespon industri 4,0**
3. Peningkatan **efektivitas perlindungan sosial dan subsidi**
4. Penguatan kualitas **desentralisasi fiskal**
5. Penguatan reformasi birokrasi sebagai bagian **reformasi institusional**
6. Peningkatan **investasi & ekspor**



Pelebaran *Fiscal Space*

1. Peningkatan *tax ratio*
2. Pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan daya saing dan inovasi
3. Pengelolaan **aset yang optimal**
4. Peningkatan efisiensi belanja
5. Pengembangan pembiayaan kreatif & inovatif
6. **Pendalaman pasar keuangan**



Pengendalian Risiko APBN sehat berkelanjutan

1. Pengendalian defisit dan rasio utang
2. Keseimbangan primer menuju positif
3. Memperkuat ketahanan fiskal

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH 2020-2024



TAX RATIO MENINGKAT, DEFISIT DAN RASIO UTANG TERKENDALI DAN KESEIMBANGAN PRIMER MULAI POSITIF PADA TAHUN 2020

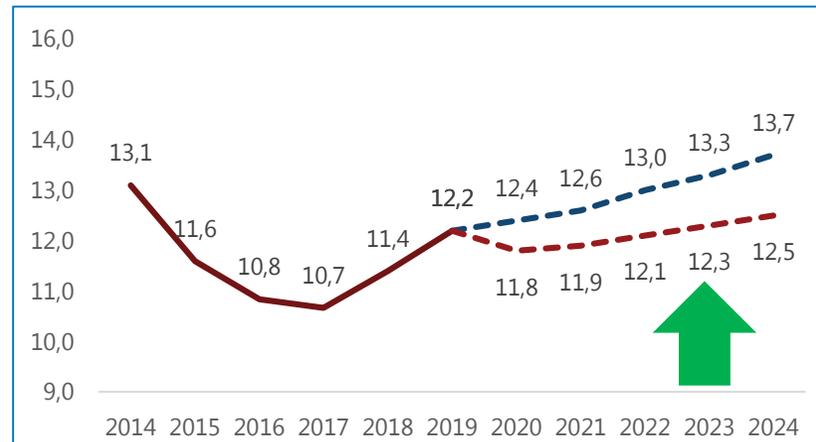
ARAH MAKRO FISKAL JANGKA MENENGAH

Mendorong pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan dalam jangka menengah serta efektif untuk mewujudkan kesejahteraan

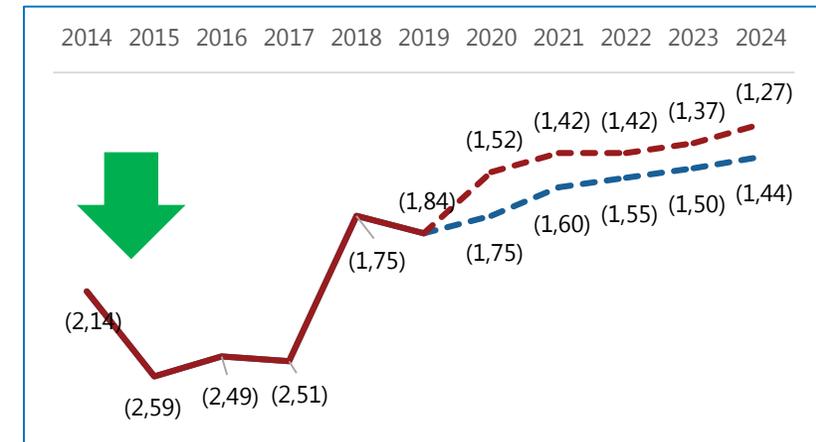
Arah Makro Fiskal

1. Mobilisasi pendapatan melalui penerimaan **perpajakan yang didorong meningkat** dan Reformasi PNBP
2. Defisit **dikendalikan pada batas aman**
3. Keseimbangan primer **didorong positif**
4. Rasio utang **dijaga pada kisaran 30% PDB** dan diupayakan menurun

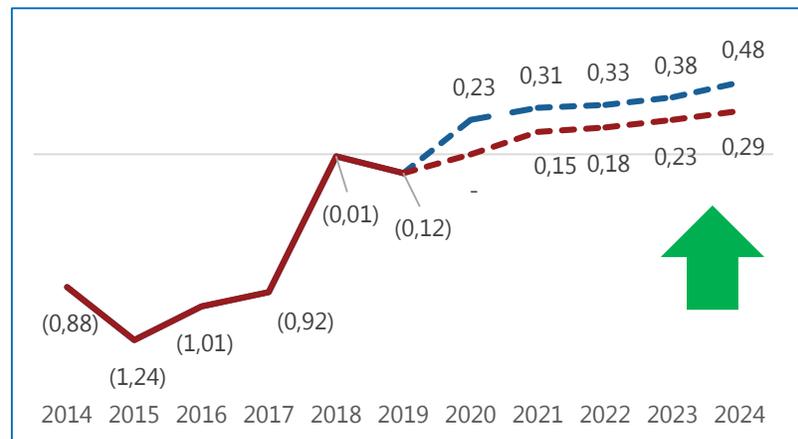
Tax Ratio (% PDB)



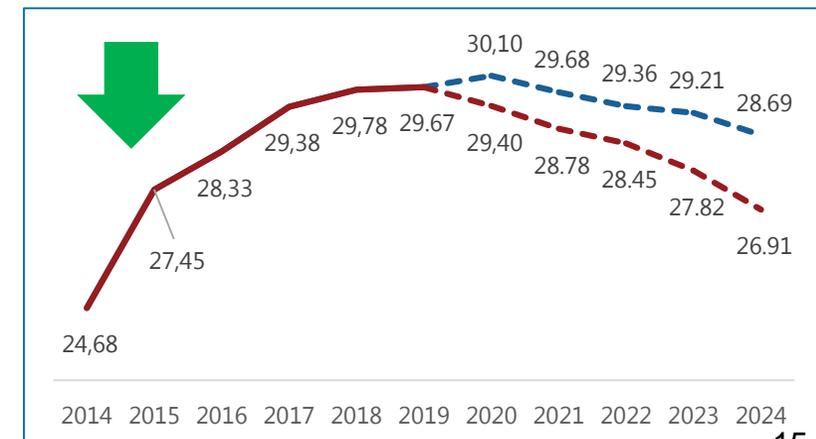
Defisit (% PDB)



Keseimbangan Primer (% PDB)



Rasio Utang (% PDB)





KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN ARAH KEBIJAKAN MAKRO FISKAL 2020



PELAKSANAAN APBN 2019

Pelaksanaan APBN 2019 digunakan sebagai dasar perumusan asumsi makro fiskal 2020

- **Risiko perkembangan kondisi ekonomi makro:** perlambatan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan volatilitas keuangan global
- **Risiko penerimaan perpajakan, PNBPN SDA** seiring potensi penurunan harga minyak (ICP) dan harga komoditas
- Proyeksi belanja masih berpotensi terjadi penghematan alamiah

APBN

	Growth	5,3	▼
	Inflasi	3,5	
	Kurs	15.000	▼
	SPN 3 Bulan	5,3	▲
	ICP	70	▼
	Lifting Minyak	775	▼
	Lifting Gas	1.250	▼



Pendapatan Negara dan Hibah

- Risiko Penerimaan Perpajakan (akibat risiko global dan penurunan harga komoditas).
- Risiko PNBPN SDA (potensi penurunan ICP, nilai tukar dan harga komoditas)



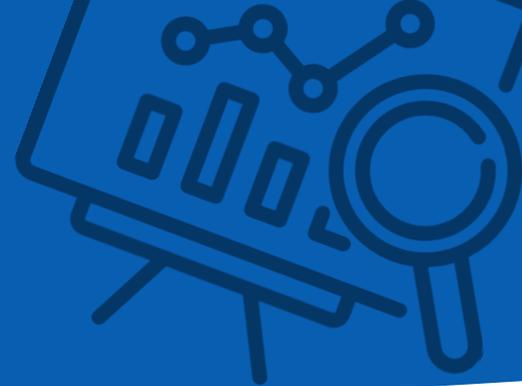
Belanja Negara

- Penyerapan alamiah belanja K/L Berkisar 94-97%
- Penyerapan belanja negara diperkirakan berkisar 96-98%

Defisit anggaran tetap terkendali



ASUMSI EKONOMI MAKRO 2017-2020



Instrumen	2017	2018	2019	2020
	Realisasi	Realisasi	APBN	PROYEKSI
a. Pertumbuhan ekonomi (% ,yoy)	5,07	5,17	5,3	5,3 – 5,6
b. Inflasi (% , yoy)	3,6	3,13	3,5	2,0 – 4,0
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,0	4,95	5,3	5,0 – 5,6
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	13.384	14.247	15.000	14.000 – 15.000
e. Harga minyak mentah Indonesia (US\$/barel)	51	67,5	70	60 – 70
f. <i>Lifting</i> minyak (ribu barel per hari)	804	778	775	695 – 840
g. <i>Lifting</i> gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.142	1.145	1.250	1.191 – 1.300



ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2020

Tema RKP:
Peningkatan Sumber Daya Manusia
untuk Pertumbuhan Berkualitas



TEMA KEBIJAKAN FISKAL

“APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”

STRATEGI 2020

“EKSPANSIF TERARAH
DAN TERUKUR”

1. *Tax Ratio*: 11,8-12,4% PDB
2. Defisit: (1,52-1,75)% PDB
3. *Primary balance*: 0,0-0,23% PDB
4. *Debt Ratio*: 29,40-30,1 % PDB

APBN 2020 diarahkan untuk:



Inovasi dan penguatan SDM untuk peningkatan produktivitas



Akselerasi daya saing untuk penguatan investasi dan ekspor



Adopsi perkembangan ICT (digitalisasi, *e-commerce*, *internet of things*, AI, AR)



Mendukung transformasi industrialisasi dan reformasi institusional



Konsisten menjaga kesehatan fiskal agar tetap efektif, fleksibel, dan *sustainable*



FOKUS KEBIJAKAN FISKAL 2020

Mendorong pemanfaatan anggaran lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan



SDM yang berkualitas untuk produktivitas dan inovasi

- Membangun SDM yang sehat (produktif) → promotif & preventif, peningkatan efektivitas program JKN
- Membangun SDM yang terampil → SDM yang memiliki *skill, entrepreneurship* dan penguasaan ICT (industri 4,0), *link and match* yang dilakukan dengan mendorong pendidikan tinggi berskala internasional, pendidikan vokasional dan revitalisasi BLK (penguatan ketenagakerjaan dan pra kerja), serta kebijakan afirmatif untuk masyarakat miskin (*sinergi PIP dan Bidik Misi*, serta perluasan sasaran pada KIP Kuliah)
- Membangun SDM yang inovatif dan berintegritas → Mendorong kegiatan penelitian a.l. melalui Dana Abadi Penelitian dan insentif untuk riset serta penguatan karakter
- Membangun SDM yang sejahtera → Menjaga daya beli masyarakat miskin dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan dengan *Integrasi dan sinergi bansos/subsidi* (PKH dan BPNT/Rastra) agar lebih efektif dalam penyaluran serta menjaga harga sembako yang terjangkau



Akselerasi Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi

- Mendukung transformasi industrialisasi (pangan, energi, air, konektivitas) dan antisipasi masalah sosial di perkotaan (air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah dan transportasi massal)
- Mendorong K/L menggunakan skema pembiayaan kreatif (KPBU: VGF atau AP)



Desentralisasi Fiskal yang Berkualitas

- Mendorong pusat pertumbuhan ekonomi di daerah
- Mendorong Pemda agar proaktif mengembangkan skema pembiayaan kreatif (KPBU)
- Penguatan *mandatory spending* di daerah
- Peningkatan *akuntabilitas dan efektivitas* pengelolaan TKDD
- Pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan



Birokrasi yang efisien dan efektif merupakan bagian *Institutional reform*

- Mendorong produktivitas, integritas & pelayanan publik
- Peningkatan kesejahteraan (*reformasi gaji & skema pensiun*)
- Birokrasi yang berbasis kemajuan ICT



Antisipasi ketidakpastian

- Mitigasi risiko bencana
- Pelestarian lingkungan dan pengembangan EBT
- Stabilitas ekonomi, keamanan dan politik
- Penguatan *fiscal buffer* untuk fleksibilitas dan sustainability



STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2020



MOBILISASI PENDAPATAN YANG INOVATIF

- Meningkatkan *Tax Ratio*
- Reformasi perpajakan untuk **merespon ekonomi digital**
- Insentif fiskal untuk mendorong daya saing **investasi dan ekspor**
- Reformasi PNBP al. peningkatan **pengelolaan SDA dan aset**
- Peningkatan **kualitas pelayanan publik.**

PEMBIAYAAN YANG KREATIF

- **Pembiayaan kreatif dan inovatif** yang mengikutsertakan peran swasta
- Defisit dan rasio utang terkendali
- Keseimbangan primer positif
- Efektifitas peran quasi fiskal sebagai *agent development* (BUMN & BLU)
- **Pendalaman pasar keuangan domestik**
- Antisipasi **pemindahan Ibu Kota**

BELANJA NEGARA YANG EFEKTIF

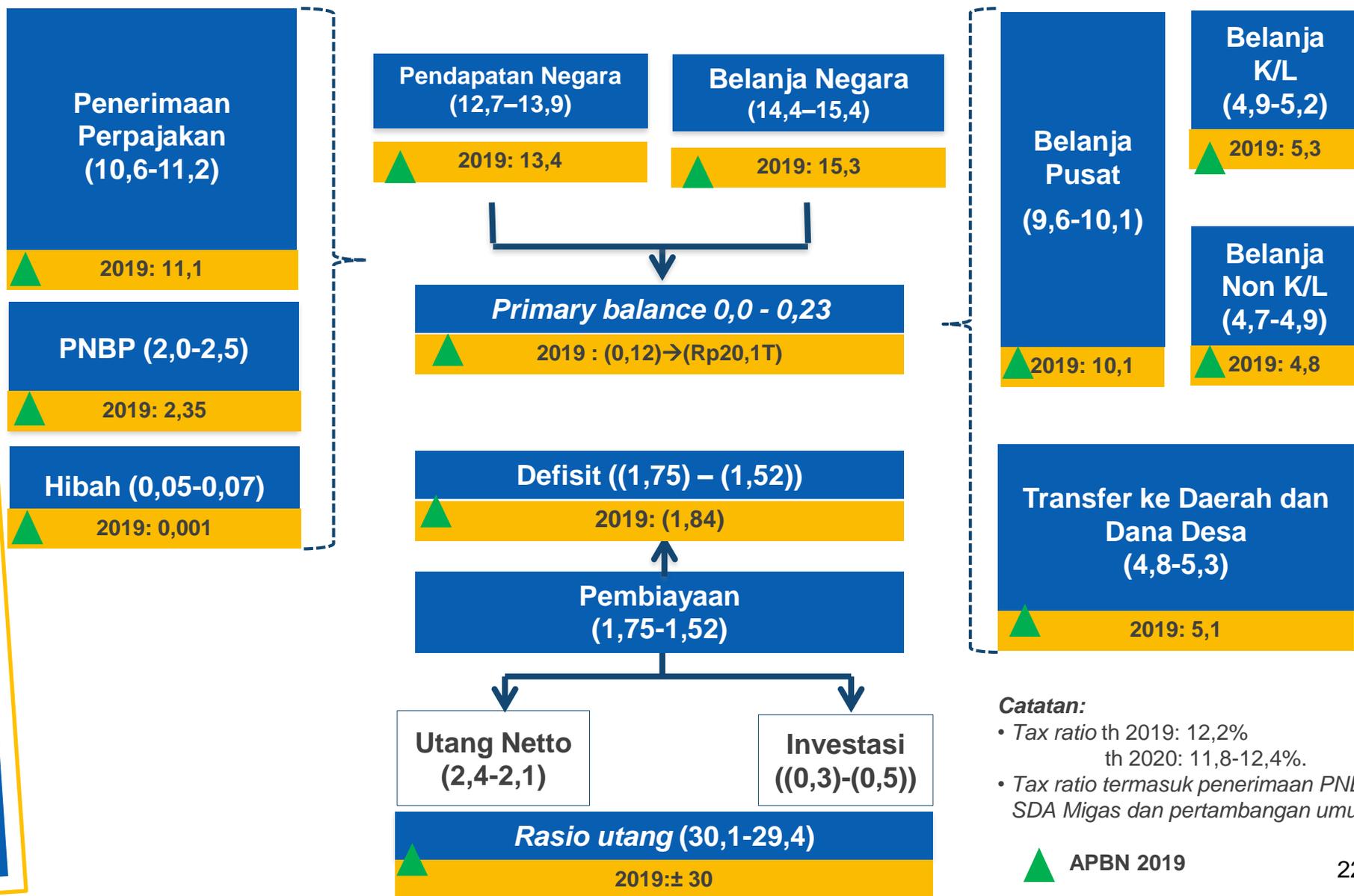
- Penguatan daya saing SDM (*vokasional, link & match, penguasaan ICT, dan R&D*)
- Program perlindungan sosial yang komprehensif: **sinergi dan integrasi antarprogram serta selaras dengan profil demografi**
- **Mendorong subsidi yang efektif dan tepat sasaran disertai dengan perbaikan mekanisme penyaluran yang terintegrasi dengan bantuan sosial**
- Mendorong **investasi dan ekspor** (penguatan industri domestik dan **mengurangi defisit *current account***)
- **Melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi dan respon industri 4,0** (energi, pangan, dan air, penguasaan ICT serta konektivitas)
- Penguatan **kualitas desentralisasi fiskal (mendorong pusat pertumbuhan di daerah)**



EKSPANSIF YANG TERARAH DAN TERUKUR (1,52-1,75% PDB) mobilisasi pendapatan, *spending better* dan inovasi pembiayaan

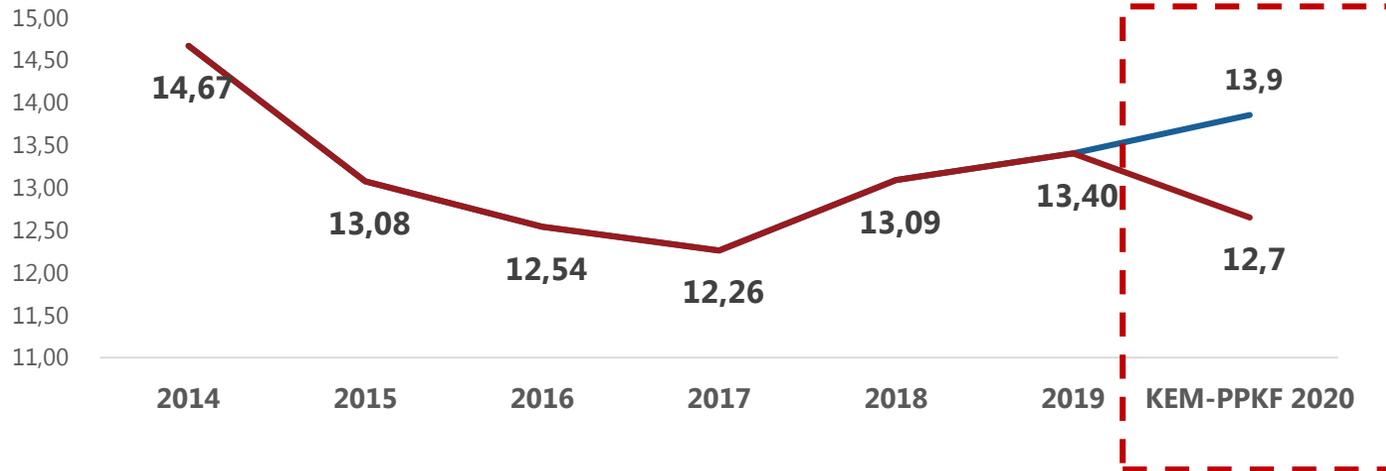


POSTUR MAKRO FISKAL TAHUN 2020 (% PDB)





Pendapatan Negara (% PDB)



KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN NEGARA 2020

1. **Optimalisasi pendapatan** melalui penggalan potensi, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan dan reformasi administrasi dan pemanfaatan IT;
2. Pemberian **insentif fiskal** untuk penguatan investasi, daya saing dan SDM;
3. **Menselaraskan peraturan** dengan kesepakatan internasional;
4. **Optimalisasi pengelolaan SDA dan BMN**;
5. Peningkatan **tata kelola PNBPN dan efisiensi kinerja BUMN**.
6. **Penyesuaian tarif dengan tetap menjaga peningkatan kualitas pelayanan publik**.

TANTANGAN

- Ketidakpastian perekonomian global;
- Volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap nilai tukar, kurang optimalnya lifting minyak;
- Menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan perlindungan terhadap lingkungan;
- Merespon aktivitas ekonomi yang berbasis kemandirian ICT (industri 4,0) dan optimalisasi pengelolaan asset ;



ARAH KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2020

Terutama mendorong peningkatan rasio penerimaan perpajakan dengan tetap memberi insentif fiskal untuk daya saing dan investasi



Insentif Perpajakan untuk Meningkatkan Investasi, Daya Saing, dan Kualitas SDM

- Mendorong sektor berorientasi ekspor, sektor hulu, dan hilirisasi industri. Diberikan perluasan Tax Holiday dan Investment Allowance untuk industri dan kawasan tertentu
- Memberikan *super deduction* untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan



Optimalisasi Penerimaan Melalui Perbaikan Administrasi dan Peningkatan Kepatuhan Perpajakan

- Memperbaiki kualitas pelayanan, penyuluhan, pengawasan perpajakan dengan melakukan penguatan sistem IT dan administrasi perpajakan
- *Joint Program* DJP-DJBC dan DJP-DJPK-Pemda;
- Menciptakan *level playing field* bagi semua pelaku usaha, baik konvensional maupun *e-commerce*
- Mengidentifikasi Barang Kena Cukai (BKC) Baru di perekonomian



Menyelaraskan Peraturan dengan Kesepakatan Internasional

- AEoI, EoI *on request*, dan *Country by Country reporting*
- P3B dan MLI untuk meminimalkan *double taxation*, *double non-taxation*, dan *BEPS*.



ARAH KEBIJAKAN PNBP TAHUN 2020

Optimalisasi PNBP dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, kualitas pelayanan, perkembangan dunia usaha, dan daya beli masyarakat.



Penyempurnaan tata kelola PNBP pasca lahirnya UU PNBP No. 9/2018 a.l.:

- Menyelesaikan beberapa RPP turunan dari UU No. 9/2018
- Memperkuat kewenangan Menkeu dalam penetapan tarif serta penegasan tugas dan tanggung jawab K/L untuk verifikasi
- Menyempurnakan pemeriksaan pengelolaan PNBP serta menyediakan opsi keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP



Pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang optimal, efektif, dan efisien a.l.:

- Mendorong optimalisasi produksi SDA melalui pengembangan lapangan *onstream* baru migas dan kemudahan perizinan
- Menjalankan upaya pencapaian target *lifting* migas
- Menyempurnakan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian perusahaan
- Mendorong efisiensi kegiatan usaha hulu dalam mendukung peningkatan PNBP bagian pemerintah



Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan BMN a.l.:

- Mengoptimalkan pemanfaatan BMN melalui sewa, kerja sama pemanfaatan, dll
- Melakukan pemetaan dan inventarisasi melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian BMN



Peningkatan efisiensi kinerja BUMN guna menghasilkan laba bersih yang lebih besar a.l.:

- Meningkatkan profitabilitas dan likuiditas perusahaan terutama mempertimbangkan tingkat laba dan kemampuan pendanaan
- Menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN di pasar bursa
- Mempertimbangkan regulasi dan *covenant* yang mengikat BUMN



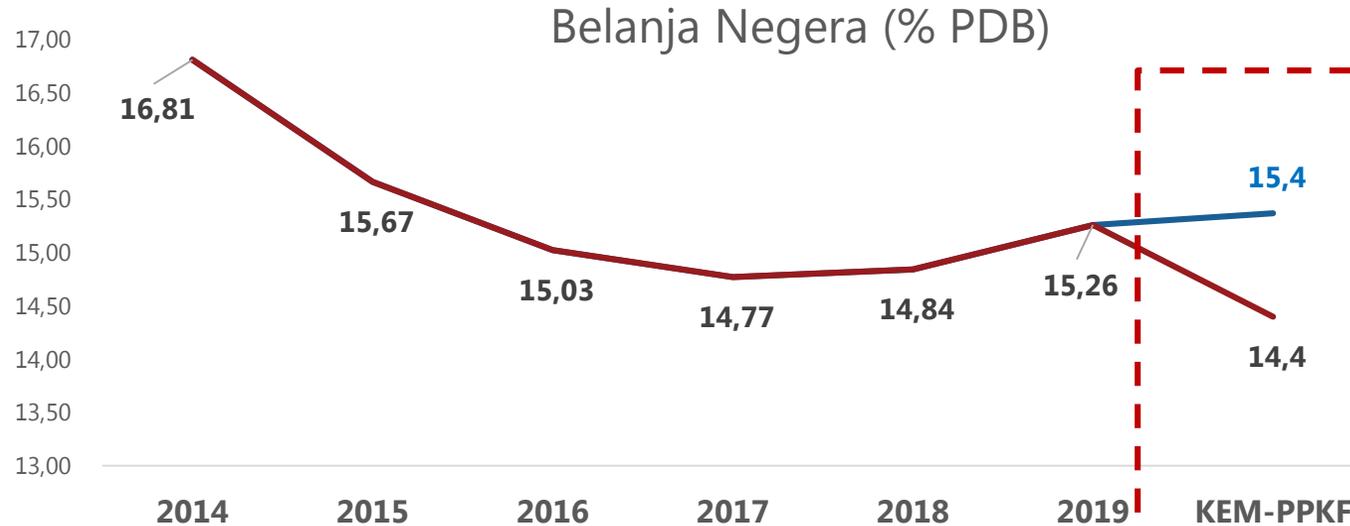
Peningkatan kualitas layanan dan penyesuaian tarif PNBP Pelayanan a.l.:

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan
- Meningkatkan kualitas SDM
- Mengintensifkan pengawasan dan penagihan PNBP
- Meningkatkan penggunaan IT



Peningkatan kinerja pelayanan BLU yang lebih profesional a.l.:

- Menerapkan tata kelola BLU yang lebih baik
- Mendorong peningkatan kinerja BLU dari investasi kas BLU
- Memodernisasi pengelolaan BLU melalui pemanfaatan IT



TANTANGAN

- Perlu mendorong efektifitas belanja untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan;
- Diharapkan mampu merespon tantangan demografi, industry 4,0 dan keluar dari *middle income trap*;
- Perlu akselerasi dan perbaikan pola penyerapan anggaran;
- Mendorong efisiensi belanja non prioritas, penguatan bansos dan subsidi tepat sasaran serta antisipasi ketidakpastian;
- endorong implementasi skema pembiayaan yang inovatif

KEBIJAKAN BELANJA NEGARA 2020

1. *Refocusing* untuk penguatan **kualitas SDM** (produktivitas dan *compatible* dengan kemajuan ICT), akselerasi **infrastruktur** untuk mendukung **transformasi ekonomi**, efektifitas **program perlindungan sosial** untuk menjawab tantangan **demografi**, penguatan **kualitas desentralisasi fiskal**, dan mendorong **investasi dan ekspor**;
2. **Penguatan belanja yang efektif (*spending better*)** melalui penghematan **belanja barang**, penguatan **belanja modal**, **reformasi belanja pegawai** untuk pemantapan reformasi birokrasi sebagai bagian reformasi institusional, serta mendorong **efektifitas bansos dan subsidi** agar tepat sasaran;
3. **Mendorong K/L agar lebih pro aktif dalam mengimplementasikan skema KPBU** secara lebih massif;
4. Menjaga **stabilitas ekonomi**, pertahanan dan keamanan, serta politik serta mengantisipasi ketidakpastian al. penanganan bencana dan konservasi terhadap lingkungan.



BAGAIMANA MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA? → SPENDING BETTER



PENGHEMATAN BELANJA BARANG

Penghematan belanja barang mengurangi beban Lap. Operasional → menambah belanja modal pembentuk aset, atau mengurangi defisit APBN dan defisit Laporan Operasional

1. **Penajaman belanja barang operasional dan non-operasional** (al. honor, bahan, dan ATK), **perjalanan dinas, pemeliharaan, dan paket meeting**
2. **Penajaman dan sinkronisasi** antara K/L & Pemda dalam **belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda**
3. Pemanfaatan hasil efisiensi untuk **penguatan reformasi birokrasi (mendorong konsumsi Pemerintah untuk target pertumbuhan ekonomi)**
4. **Belanja barang 2020:1,7-1,8 % PDB** untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 5,6 % (Konsumsi Pemerintah)

PENGUATAN BELANJA MODAL

Penguatan belanja modal untuk membentuk aset → meningkatkan ekuitas dan investasi pemerintah pendukung pertumbuhan ekonomi

1. **Belanja modal difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing** al. energi, pangan, air, penguatan konektivitas, dan transportasi masal
2. **Pembatasan** pengadaan kendaraan bermotor dan pembangunan gedung baru
3. **Mendorong agar K/L proaktif mengembangkan skema pembiayaan kreatif** dengan memberdayakan peran swasta, BUMN/BUMD dan BLU
4. **Belanja Modal 2020:1,4-1,6% PDB** untuk menjaga investasi Pemerintah

REFORMASI BELANJA PEGAWAI

Reformasi belanja pegawai untuk efektivitas birokrasi dan efisiensi jangka panjang

1. Belanja pegawai berpengaruh positif terhadap **efektivitas kinerja pemerintahan dan penurunan tingkat korupsi**
2. Efektivitas birokrasi menjadi kunci untuk mendorong keberhasilan reformasi fiskal (pendapatan, belanja, dan pembiayaan)
3. **Reformasi gaji dan pensiun** dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong efektivitas birokrasi dan memitigasi risiko kewajiban kontijensi
4. **Belanja pegawai didorong meningkat** untuk mendukung reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi

MENGEFEKTIFKAN BANSOS & SUBSIDI

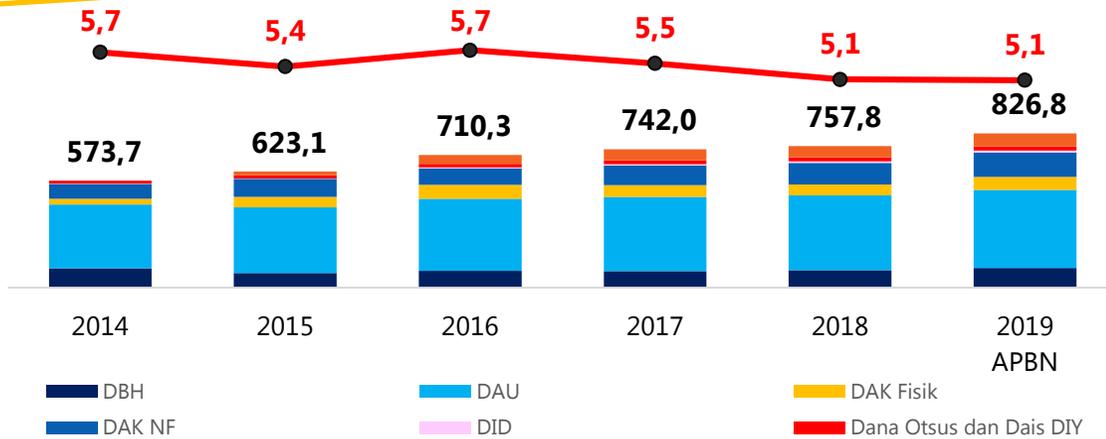
Bansos dan Subsidi sebagai instrument perlindungan sosial, investasi SDM dan sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang

1. **Integrasi dan sinergi** antarprogram bansos dan subsidi
2. Bansos yang komprehensif: **berbasis siklus hidup, antisipasi ageing population**
3. Memperkuat **kualitas implementasi** program (peningkatan ketepatan sasaran, pemanfaatan ICT, dan penguatan monev)
4. **Mendorong pemberdayaan dan melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan** (mulai mendorong perlindungan sosial yang **berbasis produktivitas**)



PENGUATAN KUALITAS DESENTRALISASI FISKAL MELALUI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif untuk membentuk aset



Fokus Kebijakan Tahun 2020

- Meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar publik di daerah seperti pendidikan dan kesehatan;
- Mendukung penguatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah terutama di kawasan 3T;
- Mendukung kesinambungan program strategis (a.l pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pembangunan SDM, dan akselerasi daya saing);
- Meningkatkan sinergi pusat dan daerah terutama dalam aspek perencanaan dan penganggaran;
- Mendorong penggunaan belanja di daerah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip value for money;
- Mendorong strategi pembiayaan kreatif bagi Pemda untuk mengakselerasi pembangunan di daerah.

Tantangan dan Isu Strategis

Pemenuhan Mandatory Spending untuk Pelayanan Publik	
Pendidikan (20%)	146 daerah belum memenuhi (26,9%)
Kesehatan (10%)	64 daerah belum memenuhi (11,8%)
Infrastruktur (25% DTU)	289 daerah belum memenuhi (53,3%)
ADD (10% DTU)	83 daerah belum memenuhi (16,3%)

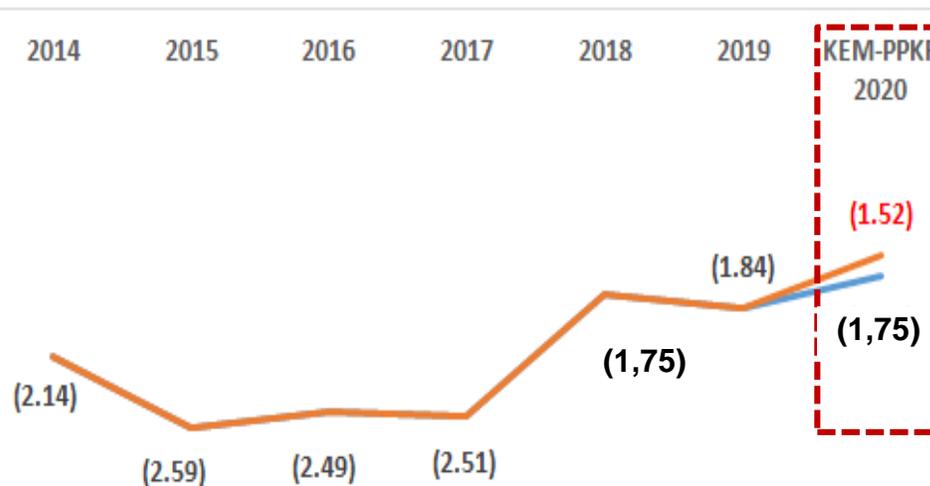
1. Penguatan Kualitas SDM dan akselerasi daya saing;
2. Pengurangan kesenjangan dan kemiskinan daerah;
3. Konektivitas dan pemerataan pembangunan kewilayahan;
4. Pengelolaan perubahan iklim, lingkungan hidup, dan risiko kebencanaan;
5. Mendorong nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja di daerah.



PEMBIAYAAN YANG KREATIF DAN INOVATIF

Mendorong pengembangan skema pembiayaan inovatif dan pengendalian risiko yang solid untuk mengendalikan liabilitas

DEFISIT (% PDB)



TANTANGAN 2020

- Perlu mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif yang lebih masif
- Perlu pengendalian penambahan utang dan mitigasi risiko utang (risiko valas dan risiko suku bunga)
- Perlu mendorong efektifitas peran BUMN dan BLU sebagai agen pembangunan

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN 2020

1. Menjaga rasio utang di kisaran 30% PDB, *primary balance* positif, menjaga defisit di kisaran 1,52-1,75% PDB;
2. Pemberian PMN untuk mendorong peran BUMN sebagai agen pembangunan dilakukan secara selektif dengan pertimbangan (mampu *leverage*, sehat secara finansial dan kesiapan proyek secara operasional);
3. Mendorong peran BUMN, BLU untuk akselerasi infrastruktur, kemudahan akses pembiayaan bagi KUMKM, UMI dan pembiayaan perumahan bagi MBR dan pengembangan EBT serta mengantisipasi pemindahan Ibu Kota;
4. Mendorong pendalaman pasar SBN domestik, dan memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian;
5. Terus mendorong LPDP sebagai SWF dan mendorong peningkatan ekspor melalui program NIA.



TERIMA KASIH
